

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat merupakan komponen besar dan kompleks dalam pembicaraan tentang kehidupan sosial. Di dalamnya ditemukan berbagai keberagaman pikiran dan perilaku. Keterkaitannya dengan individu, maka ia menjadi bagian integral dari sebuah komunitas, dan komunitaslah yang membentuk masyarakat. Substansi ini kemudian menyadarkan adanya saling ketergantungan dan keinginan untuk memberikan sumbangsih (partisipasi) guna kehidupan bersama. Perwujudan partisipasi masyarakat biasanya berupa andil untuk menyediakan diri dan pikiran untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui individu-individu dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Persoalan keterlibatan atau partisipasi terjadi dengan membentuk penyatuan beberapa keinginan individu, kemudian digunakan untuk membedah potensi yang dimiliki guna kemaslahatan masyarakat secara luas. Tindakan ini dilanjutkan dengan menjalani apa yang menjadi konsekuensi dan komitmen dan bila ditemui kendala, maka secara bersama-sama diselesaikan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Masalah yang seringkali berkenaan dengan partisipasi masyarakat adalah persoalan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Selama ini hanya pemerintah saja yang dominan memberikan perhatian penuh kepada masalah ini. Pemerintah dalam hal ini negara, bertanggung jawab untuk mendanai sekaligus mengakomodasi pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya ikut memberikan andil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya komunikasi intensif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis, antara lain memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan, karena kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan sebagai agen dan pencetak sumber daya manusia. Di samping itu, melihat kenyataan bahwa berdasarkan data UNDP tentang *Human Development Index* (HDI) menunjukkan dari 174 negara, Indonesia berada pada posisi kurang menggembirakan yakni peringkat 110, sementara negara Asean lainnya berada di atasnya, Japan berada di peringkat 11, Singapura berada peringkat 25, Korea berada pada peringkat 28 Brunei Darusalam peringkat 33, Malaysia peringkat 61, Thailand peringkat 73, Pilipina urutan 84, Cina pada peringkat 85, Vietnam di

peringkat 108, Indonesia peringkat 110, Myanmar peringkat 129, Kambodja pada peringkat 130. (Source: UNDP - Human Development Report 2005).

Pengembangan dalam bidang pendidikan di Indonesia sekarang ini menggunakan empat strategi dasar, yakni, *pertama*, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, *kedua* relevansi, *ketiga*, *peningkatan kualitas* dan *ke empat*, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan (Natsir, 2002). Dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah. Strategi ini perlu mendapat prioritas karena ternyata banyak anak-anak di Indonesia, terutama di pedesaan masih banyak yang belum mengenyam pendidikan, terutama di tingkat SLTP. Di samping itu, masalah pemerataan pendidikan menurut Hadikusum (1995: 99) mencakup tiga aspek pokok, yaitu persamaan kesempatan, (*equality of opportunity*) aksesibilitas (*accessibility*), dan keadilan atau kewajaran (*equity*) Pemerataan kesempatan berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi” Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Begitu pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak membedakan warga negara menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Aksesibilitas artinya setiap orang tanpa membedakan asal usulnya memiliki akses (kesempatan masuk) yang sama kedalam pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan keadilan disini adalah perbedaan perlakuan pada peserta didik sesuai dengan kondisi internal dan eksternal.

Secara moral-etis adalah adil dan wajar apabila peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat dan minatnya.

Terkait dengan partisipasi masyarakat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor geografis, perekonomian keluarga, tradisi masyarakat, dan sarana prasarana pendidikan. Faktor geografis yang mendasari karena adanya kenyataan bahwa rakyat Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang luar biasa luasnya dan tersebar pada ribuan pulau di seluruh tanah air. Dengan tersebarnya pulau-pulau, mereka sebagian masih hidup secara berkelompok dengan pola hidup yang sederhana dan pandangan yang tradisional. Oleh karena itu sebagian besar mereka yang tinggal di daerah terpencil kurang memperhatikan pentingnya pendidikan.

Keadaan seperti ini merintangi tersebarluasnya kesempatan pendidikan secara merata. Dengan demikian, tidak mengherankan jika ada suatu kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pendidikan ke jenjang SLTP, bahkan sebagian lagi ada yang belum lulus SD. Masalah ini bukan karena anak tidak mau, tapi karena letak tempat tinggal mereka yang tidak mungkin dijangkau sarana pendidikan. Wilayah seperti itu seringkali tidak memungkinkan berlangsungnya usaha pendidikan secara baik, disamping faktor geografis juga usaha menanamkan pengertian tentang pentingnya pendidikan karena pola hidup yang terbelakang.

Alasan seperti ini selalu mewarnai pola pandang para masyarakat pedesaan yang pekerjaannya sebagai petani, khususnya di wilayah SMP Negeri 3 Pulubala. Sebagai masyarakat petani tenaga kerja sangat penting, anak-anak juga merupakan

tenaga kerja bagi keluarga yang bersangkutan. Tradisi bertani, berladang, dan bercocok tanam lainnya melahirkan suatu kebiasaan menggunakan anak istri sebagai tenaga kerja murah. Dengan demikian, akhirnya anak akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah.

Terdapat anggapan orang tua bahwa bahwa asal anak-anak mereka sudah bisa membaca dan menulis masalah sekolah sudah cukup dan tidak perlu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan anak perempuan akan lebih parah lagi keadaannya, mereka tidak mendapatkan kesempatan seluas anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan disekolahkan tidak ada manfaatnya sebab biarpun bersekolah tinggi akhirnya akan kembali juga, yaitu tugasnya sebagai istri yang harus di dapur dan beranak. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau di daerah di pedesaan yang sebenarnya masih dalam usia sekolah terpaksa harus dinikahkan. Ditambah lagi adanya alasan bahwa tanggung jawab keluarga adalah laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga, sementara pihak perempuan hanya mengikuti saja. Hal inilah yang menjadi hasil studi awal melalui observasi terhadap partisipasi masyarakat untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di SMP Negeri 3 Pulubala Kabupaten Gorontalo.

Beberapa alasan di atas memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar atau APK. Menurut Holil Soelaiman (1980: 2) bahwa rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu yang digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi

penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan angka partisipasi kasar di SMP Negeri 3 Pulubala Kabupaten Gorontalo, bahwa partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Sosialisasi dilakukan oleh masyarakat untuk menarik minat calon siswa serta memberikan pemahaman yang jelas terhadap orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Selain sosialisasi, masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan pembiayaan terhadap pembangunan fisik dan nonfisik di sekolah. Artinya, sekolah dan masyarakat secara bersama-sama merumuskan berbagai biaya yang timbul atas sebuah kebijakan. Hasilnya kemudian diteruskan kepada warga lain, setelah itu dilaporkan kembali pada pertemuan-pertemuan lainnya.

Bertolak dari berbagai hal tersebut, maka penulis bermaksud mengkaji masalah tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar di SMP Negeri 3 Pulubala Kabupaten Gorontalo”.

B. Fokus Masalah

Bertolak dari konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pendidikan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar di SMP Negeri 3 Pulubala Kabupaten Gorontalo.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar di SMP Negeri 3 Pulubala Kabupaten Gorontalo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi pendidikan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar di SMP Negeri 3 Pulubala Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar di SMP Negeri 3 Pulubala Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat memberikan informasi faktual pengaruh pandangan tentang nilai anak, persepsi pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi secara bersama-sama terhadap program wajib belajar sembilan tahun selain itu agar mereka ikut memikirkan dan mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan masukan agar mereka mengubah pandangannya tentang nilai anak dan visi pendidikan demi menyukseskan program belajar anak.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.